

Implementasi Program Taman Teknologi Pertanian (Ttp) di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal

The Implementation of Agricultural Technology Park (Atp) Program in Lebaksiu District, Tegal Regency

Brian Pratama, Eny Lestari, Dwiningtyas Padmaningrum

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 Ketingan Surakarta 57126 Telp/Fax (0271) 637457

Email: brianprtma@student.uns.ac.id

Abstrak: Melalui model implementasi kebijakan George C Edward III penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program TTP dari sudut pandang *stakeholder* sebagai pelaksana program yang meliputi 1) proses komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah 2) dukungan sumber daya yang dialokasikan 3) sikap kecenderungan *stakeholder* 4) struktur birokrasi yang terjadi dalam program TTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu dari 26 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi pembangunan TTP. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi program TTP di Kecamatan Lebaksiu telah berjalan dan menjadi bagian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal. Proses komunikasi yang terjadi belum berjalan baik dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas, keberlanjutan komunikasi belum terjadi antar *stakeholder*, dan kemampuan implementator dalam menangkap dan memahami informasi juga berbeda. Dukungan sumber daya yang dialokasikan untuk TTP masih sangat minim, baik pada sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran. Sikap kecenderungan *stakeholder* sudah terlaksana cukup baik. Struktur birokrasi dalam implementasi TTP Lebaksiu masih belum maksimal sebab belum terbentuk SOP.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program, Taman Teknologi Pertanian (Ttp)

Abstract: *By using George C Edward III's policy implementation model, this study aimed to analyze the implementation of the ATP program from the perspective of stakeholders as program implementers which includes 1) the communication process carried out by the regional government 2) the support of allocated resources 3) the attitude tendencies of stakeholders 4) the bureaucratic structure that operates in the ATP program. This study used a qualitative approach with the descriptive method. The research location was determined by using a purposive method in Lebaksiu District, Tegal Regency, which is one of the 26 regions in Indonesia selected as the location of ATP development. The source of data used in this study were primary data and secondary data. The data collection technique carried out by in-depth interviews, documentation and observation. The data analysis was carried out in three stages, consisting of data reduction, data display and conclusion drawing. The results of the study showed that the implementation of the ATP program in Lebaksiu District has been running and is part of the Agriculture and Food Security office of Tegal Regency. The communication process that occurred has not been going well because of the unclear delivery of information, the continuity of communication has not occurred between stakeholders, and the ability of implementers to catch and understand information is also different. Support of allocated resources for ATP is still very minimal, both in human resources and budget resources. The attitude tendencies of stakeholders have been implemented quite well. The bureaucratic structure in the implementation of ATP in Lebaksiu is still not optimal because SOP has not yet been compiled.*

Keywords: *Policy Implementation, Programs, Agricultural Technology Park (Atp)*

PENDAHULUAN

Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sangat penting karena sebanyak 35.875.389 masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Kementan, 2018). Menurut Wibowo (2011) beberapa alasan yang mendasari sektor pertanian penting bagi Indonesia diantaranya, yaitu: 1) potensi sumberdaya yang besar dan beragam, 2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, 3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini dan 4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Dalam hal pemanfaatan sumberdaya pertanian di Indonesia, dipandang perlu adanya inovasi pembangunan pertanian melalui pemberdayaan petani kecil (Ardhana, 2008).

Menurut Indraningsih (2011) pemberdayaan petani kecil tidak terlepas dari proses adopsi inovasi dan teknologi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya: tingkat partisipasi petani, harga input dan nilai output, tingkat pendidikan, ketersediaan modal dan tenaga kerja serta kelembagaan pendukung. Salah satu upaya tersebut sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diinisiasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) melalui Taman Teknologi Pertanian (TTP). TTP bertujuan untuk mempertajam fungsi Badan Litbang Pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan berbasis inovasi teknologi dan kelembagaan (Kementan, 2016).

Inti kegiatan TTP adalah membangun pengembangan sektor pertanian yang berwawasan agribisnis hulu hilir yang bersifat spesifik lokasi. Kegiatan yang dilakukan di TTP berkaitan dengan penerapan beragam penerapan teknologi meliputi: pra produksi, produksi, pra panen, pasca produksi, pengolahan hasil dan pemasaran serta wahana untuk pelatihan dan inkubasi bisnis bagi pelaku agribisnis bidang pertanian. Melalui program ini diharapkan wilayah kabupaten/kota dapat menjadi pusat penerapan teknologi untuk mendorong perekonomian setempat serta sebagai tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi,

serta pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas. Melihat peran strategisnya, penerapan TTP yang berjalan baik akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat TTP (Kementan, 2016).

Kementan melalui Badan Litbang Pertanian pada tahun 2015 membangun satu Taman Sains dan Teknologi Pertanian Nasional (TSTPN), lima Taman Sains Pertanian (TSP) dan 16 Taman Teknologi Pertanian (TTP). Sebanyak empat TSP dan 10 TTP juga dikembangkan pada tahun 2016. Salah satu wilayah yang mulai menerapkan program TTP adalah Kabupaten Tegal yang dibangun tahun 2015 dengan menempati areal tanah pemerintah daerah Kabupaten Tegal seluas 4,5 hektar, dan bertempat di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Salah satu program yang dijalankan Kementerian Pertanian ini secara konseptual merupakan salah satu pilihan model yang dikembangkan Kementan, untuk menumbuhkan klaster-klaster bisnis baru sebagai dampak dari difusi teknologi dan pengembangan kawasan yang dikelola bersama instansi terkait dan masyarakat atau kelompok tani setempat (Khoirunnas dan Niswah, 2017).

Taman Teknologi Pertanian (TTP) adalah program kebijakan pemerintah pada sektor pertanian yang berfungsi sebagai: (a) tempat untuk penerapan teknologi pertanian hulu-hilir berwawasan agribisnis yang bersifat spesifik lokasi, (b) tempat untuk percontohan dan penerapan inovasi yang telah dikembangkan di TSP, dan (c) tempat pelatihan, pemagangan, inkubasi kemitraan usaha, diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas. Program TTP terdiri atas berbagai *stakeholder* yang dianggap mampu mendukung berjalannya TTP sesuai dengan konteks dan kebutuhan, dimana idealnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten untuk melayani petani dan pelaku usaha di wilayah. Tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten terwujud dalam dukungan kuat berupa komitmen dan *ownership* atas pengembangan TTP. TTP dalam melaksanakan kegiatannya secara konseptual bisa merangkul berbagai elemen yang bersifat situasional dan bisa melibatkan pemerintah maupun swasta. Pihak lain yang ikut andil dalam pengembangan TTP diantaranya yaitu unit kerja penyuluhan di daerah, dinas pertanian, dan pelaku usaha (swasta) pendukung kemitraan bidang usaha agribisnis. TTP yang berjalan baik ditandai dengan adanya kerjasama sinergis antar stakeholder TTP

serta berjalanya peran masing-masing *stakeholder* tersebut dalam membantu petani meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Hansson *et al.*, (2005) juga menyatakan peran khusus taman sains menyediakan kedekatan antar peneliti yang dipekerjakan di berbagai lembaga dan perusahaan untuk meningkatkan interaksi dan transfer pengetahuan ilmiah ke dalam konteks komersial.

Kebijakan publik menurut Anderson, yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2001). Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah. Pendapat Edwards III yang menyatakan bahwa “Kebijakan Negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah”, sehingga suatu kebijakan tidak hanya suatu tindakan yang diusulkan tetapi juga yang tidak dilaksanakan (Winarno, 2014). Demikian pula pendapat Thomas Dye (1987) yang mengatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Subarsono, 2006). Secara makro pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan produksi pertanian, karena selama ini kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia masih menggantungkan dari impor (Fatchiya *et al.*, 2016).

Sebagai sebuah kebijakan baru, kegiatan implementasi program TTP dari sudut pandang *stakeholder* perlu dipahami karena merekalah yang akan menjalankan program tersebut. Edward III dalam Winarno (2014) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) sikap kecenderungan dan 4) struktur birokrasi. Menurut Edwards III dalam Winarno (2014), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Adapun

keempat faktor atau variabel yang dikemukakan oleh Edwards III itu memiliki keterkaitan erat satu sama lainnya. Asumsinya jika masing-masing faktor atau variabel itu dapat berinteraksi dengan baik maka tujuan kebijakan akan mudah dicapai, begitu juga sebaliknya.

Berangkat dari pemahaman pentingnya peran *stakeholder* dalam implementasi TTP, maka penelitian ini akan mengkaji implementasi dari sudut pandang *stakeholder*. Konsep dari Edward III digunakan untuk melihat faktor-faktor yang penting dalam implementasi TTP. Mengacu pada konsep tersebut, ada empat variabel yang perlu dikaji, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) sikap kecenderungan, serta 4) struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2003).

Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* (sengaja) atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2006) *purposive* adalah lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah TTP Lebaksiu yang berada di Kabupaten Tegal. Peneliti memilih TTP Lebaksiu sebagai lokasi penelitian karena dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Tegal merupakan salah satu dari 26 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi pembangunan TTP. Penelitian dilaksanakan pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 yaitu antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana kriteria informan didasarkan pada keterlibatan langsung terhadap TTP hal tersebut digunakan untuk dapat menentukan informan atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang pelaksanaan

kebijakan pembangunan TTP Lebaksiu, pihak yang terlibat berjumlah 8 orang yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, swasta, asosiasi petani, dan kecamatan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif serta sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diambil dengan wawancara terhadap informan berkaitan dengan sejarah pembangunan hingga rencana pembangunan TTP, observasi kegiatan lapang meliputi pemeliharaan hewan ternak, pemeliharaan tumbuhan dan kegiatan *briefing* pekerja harian, dan dokumentasi berupa pencatatan kegiatan, menghimpun laporan pelaksanaan dan dokumen tertulis mengenai penyerahan dan rencana pengembangan program.

Definisi konseptual dari tujuan penelitian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut yaitu *stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap program TTP Lebaksiu. *Stakeholder* terdiri atas perguruan tinggi, LSM, swasta, asosiasi petani dan kecamatan. Komunikasi adalah proses penciptaan dan penggunaan informasi dari/atau antar *stakeholder* dalam program TTP Lebaksiu. Indikator-indikator komunikasi meliputi: a) transmisi, terdiri atas metode, teknik, intensitas dan saluran yang digunakan, b) kejelasan, meliputi kejelasan pesan dari hasil proses komunikasi, pesan tidak membingungkan dan pesan tidak ambigu/mendua, c) konsistensi, meliputi kejelasan dan konsistensi pesan untuk dilaksanakan. Sumber daya adalah ketersediaan sumber daya pendukung yang disediakan untuk TTP Lebaksiu oleh pemerintah daerah berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya materi. Sumber daya meliputi tingkat kompetensi staff/pegawai, informasi, pengetahuan mengenai tindakan yang harus diambil, kesesuaian penggunaan wewenang dan fasilitas pendukung serta ketersediaan dan pengalokasian dana di TTP Lebaksiu.

Sikap kecenderungan adalah faktor-faktor kemauan, keinginan dan kecenderungan *stakeholder* dalam implementasi program TTP Lebaksiu. Sikap kecenderungan meliputi kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan program TTP. Struktur birokrasi adalah *stakeholder* yang menjadi aktor dalam program TTP. Struktur birokrasi meliputi pemerintah daerah kabupaten yang

diwakilkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal sebagai penanggungjawab TTP Lebaksiu. Karakteristik utama dari birokrasi, yang akan dilihat adalah: a) *standard operating procedures* (SOP), meliputi prosedur-prosedur kerja dan ukuran-ukuran dasar, 2) fragmentasi, meliputi pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi.

Adapun analisis data dilakukan melalui teknik analisis jalinan dengan tiga macam komponen pokok berupa reduksi data, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Sutopo, 2006). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, rekaman video/audio, data dari buku, data dari web) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan reduksi selanjutnya menjadi sebuah ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus serta memo kemudian berlanjut terus hingga laporan akhir lengkap tersusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Unit Taman Teknologi Pertanian (TTP) Lebaksiu

Adanya implementasi dari Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 216/Kpts/RC.010/H/05/2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Taman Sains dan Teknologi Pertanian (TSTP) merupakan hasil turunan dari kebijakan yang terbentuk dikalangan kementerian, dimana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang menjadi penanggungjawab atas kebijakan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kementerian lain seperti Kementerian Pertanian menggagas untuk ikut membangun TTP. Gagasan tersebut kemudian diteruskan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian (BPTP) bersama dengan Badan Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi.

Lebih jauh lagi, pembangunan TTP bermula dari urgensi atas kepentingan bahwa dalam rangka memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri, khususnya industri

kecil menengah berbasis inovasi, perlu menyediakan layanan bagi industri dalam suatu kawasan yang disiapkan secara khusus, dan wahana yang akan memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dan bahwa Kawasan Sains dan Teknologi mempermudah terjadinya interaksi dan komunikasi antar pelaku yang terlibat dalam penciptaan inovasi, baik pengembangan teknologi, pengguna teknologi, maupun fasilitator atau intermediasor. Azikiwe *et al*, (2013) menyatakan bahwa penyediaan layanan penyuluhan berkualitas sangat mendorong adopsi dan peningkatan produktivitas serta pendapatan pertanian. Oleh sebab itu Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains dan Teknologi.

Berdasarkan Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Taman Sains dan Teknologi Pertanian (TTP), keberadaan TTP difokuskan pada pemberdayaan masyarakat khususnya petani dan pengusaha usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menerapkan inovasi teknologi pertanian. Dalam penerapannya tentu masih dapat dijumpai kendala-kendala yang menghambat tercapainya tujuan awal pembangunan.

TTP Lebaksiu memiliki berbagai macam infrastruktur fisik yang cukup lengkap diantaranya yaitu bangunan pendopo balai pertemuan, gedung training center, gedung TTP, museum tani, kandang kerbau, taman dan halaman hingga gapura. Infrastruktur ini menjadi penting keberadaannya bagi suatu program dalam mencapai tujuan. TTP Lebaksiu di Kabupaten Tegal mulai dibangun pada 2015 dan selesai pada tahun 2017.

“TTP itu asal muasalnya program dari pusat, kebetulan di Provinsi Jawa Tengah pembangunannya di Lebaksiu Kabupaten Tegal” (AN, 3 Oktober 2019).

Sejarah pembangunan fisik TTP di Kabupaten Tegal tidak terlepas dari dukungan Badan Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan TTP di Kecamatan Lebaksiu ini atas inisiatif dari Kepala BPD Pemprov Jateng setelah berbincang dengan Bupati Kabupaten Tegal dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

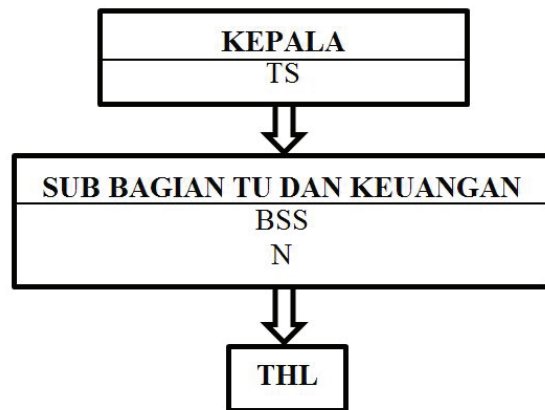
Tegal terkait rencana pembangunan TTP. Hal tersebut didukung dengan *feedback* positif dari bupati untuk memajukan pertanian di Kabupaten Tegal. Selama ini program pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Tegal belum terwujud maksimal, termasuk untuk inovasi dan teknologi pertanian, sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.

TTP yang ada di Kecamatan Lebaksiu adalah hasil kesepakatan antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Proyek pembangunan TTP Lebaksiu sepenuhnya ditanggung oleh BPTP dan BPD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pemerintah Kabupaten Tegal hanya berperan sebagai penyedia kawasan berdirinya TTP. Kemudian pada tahun 2017 TTP diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai barang hibah dari BPTP Jawa Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

“BPTP ingin di Kabupaten Tegal ini mau dibangun TTP dengan anggaran yang cukup besar” (K, 8 Oktober 2019).

Setelah dikelola oleh pemerintah daerah, barulah terjadi pergeseran arah pembangunan TTP Lebaksiu. Pemerintah daerah Kabupaten Tegal menjadikan TTP sebagai Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bersama dengan 18 UPTD lain dibawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal. Pembentukan tersebut juga merupakan hasil atas modifikasi dari UPTD Rumah Bibit yang kemudian berganti nama menjadi UPTD TTP dan Pembibitan.

Dalam sebuah kelompok, tentu ada pembagian tugas pokok untuk masing-masing pengurus agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. UPTD TTP dan Pembibitan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala, subbag tu dan tenaga harian lepas (THL). THL yang ada merupakan bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal. Berikut adalah struktur pengurus UPTD TTP dan Pembibitan tahun 2019.



Struktur Organisasi UPTD TTP dan Pembibitan (DistanKP, 2019)
(Sumber: Data Sekunder)

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi (Dunn, 2003).

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi, sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Menurut Sulistyowati (2003) bahwa kekuatan akan terjadi melalui peningkatan

taraf pendidikan, derajat kesehatan, penguatan kelembagaan serta terbukanya kesempatan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

Implementasi Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 216/Kpts/RC.010/H/05/2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Taman Sains dan Teknologi Pertanian (TSTP) dalam hal pelaksanaan kegiatan lapang terkait ketersediaan tenaga pendamping yang bertugas mendampingi para pelaku agribisnis belum terlaksana secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di beberapa lokasi yaitu di kawasan lahan TTP dimana sedikit orang yang mengerjakan petak demplot tanpa ada pendampingan. Dijumpai juga kantor UPTD TTP dan Pembibitan dijumpai sepi pengunjung, melainkan hanya terdapat THL TTP yang sedang mengisi daftar hadir dan melakukan persiapan untuk bekerja. Sedangkan kecamatan dalam kontribusinya terhadap keberhasilan dan keberlanjutan TTP hanya sebatas pada koordinator wilayah saja.

Jadi dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk melaksanakan program pembangunan TTP, walaupun dalam hal fisik keseluruhan bangunan telah selesai dan dalam kondisi baik, tetapi pada hal SDM, sumber inovasi, teknologi dan anggaran masih dalam taraf berjuang. Terutama roh TTP sebagai pusat pusat informasi dan diseminasi bagi pelaku usaha agribisnis sekitaran TTP. Selain pemda dan Dinas Tan & KP, peran stakeholder lain juga ikut mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan program TTP.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan advokasi kepada berbagai pihak. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi pemda, perguruan tinggi, swasta, asosiasi petani dan camat tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan. Adanya stakeholder tersebut ternyata tidak selamanya memberi impact yang banyak malah dapat dikatakan kurang berdampak bahkan tidak ada bagi keberhasilan dan keberlanjutan TTP.

B. Implementasi TTP menurut Model Kebijakan George C. Edward III

Hasil analisis variabel-variabel kritis dari model kebijakan Edward III dalam Program TTP Lebaksiu sebagai berikut:

1. Proses Komunikasi

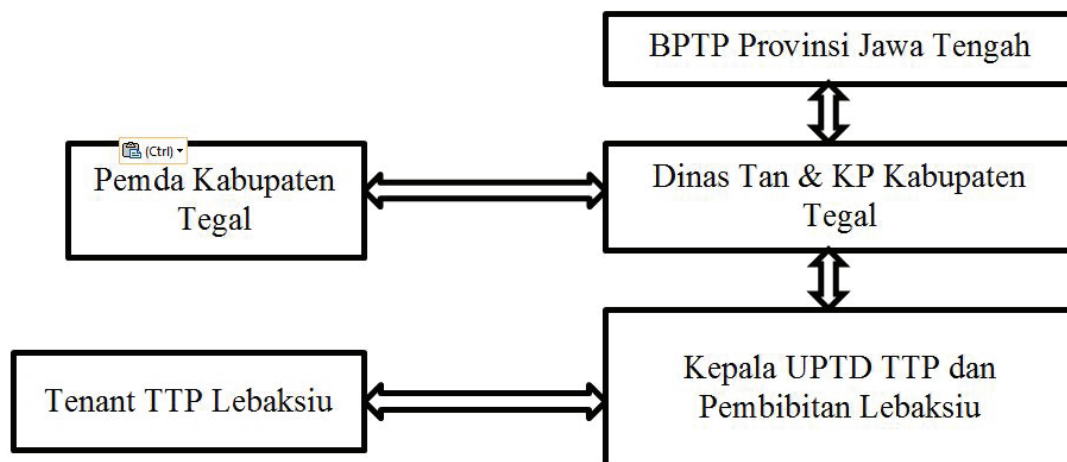
Edwards (Winarno, 2014) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi (Widodo, 2008).

a. Transmisi

Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan pembangunan TTP Lebaksiu, petunjuk pelaksanaan, perintah dan lain-lain. Sehingga komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi

internal terjadi antara pejabat Dinas Pertanian yaitu pejabat struktural BPTP Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tan & KP Kabupaten Tegal dengan pejabat UPTD TTP dan Pembibitan Lebaksiu berupa kegiatan inkubasi dan agribisnis. Komunikasi internal ini disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan informal seperti kegiatan komunikasi melalui whatsapp antara Kepala Dinas Tan & KP dengan Kepala BPTP.

Komunikasi eksternal terjadi antara pejabat Dinas Tan & KP dan pejabat UPTD TTP dan Pembibitan dengan para tenant. Dalam komunikasi ini bertujuan agar mereka mengetahui keadaan lapang yang sesungguhnya, apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan guna tujuan kebijakan pembangunan TTP dapat terwujud. Arus komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pembanunan TTP dapat dilihat sebagai berikut.



Skema Arus Komunikasi di TTP Lebaksiu (Sumber: Olahan Data Primer, 2019)

Arus komunikasi diatas sama dengan proses transmisi atau penyaluran komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan (Agustino, 2008). Implementasi dalam aspek transmisi yang terjadi cukup baik, terlihat dari pendeknya jalur birokrasi.

b. Kejelasan

Faktor kejelasan dalam implementasi TTP antara Dinas Tan & KP dengan BPTP terjadi ketika pihak BPTP menggagas usulan pembangunan fisik TTP di Lebaksiu, dengan kehadiran TTP di Lebaksiu BPTP memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan pertanian terlebih bagaimana jalannya

TTP yang ada di Lebaksiu. Kejelasan pesan yang terjadi dalam perkembangan TTP sudah cukup terjalin dengan baik. Hal tersebut tampak pada pelaksanaan pembangunan fisik TTP sesuai arahan dari BPTP.

c. Konsistensi

Intruksi yang diberikan dalam implementasi TTP Lebaksiu terjalin melalui pesan whatsapp antar pihak BPTP dengan Kepala Dinas Tan & KP. Komunikasi melalui pesan whatsapp merupakan bentuk kesungguhan implementator dalam mengawal pengembangan TTP. Lebih lanjut agar keputusan yang diambil oleh Pemkab tidak lepas dari ruh TTP. Hal tersebut tampak pada tahun pertama pengembangan TTP dimana BPTP masih mengawasi secara penuh kegiatan yang diselenggarakan, terwujud dengan maraknya kegiatan di TTP seperti kunjungan dan pelatihan serta bantuan tenaga ahli dari BPTP.

Akan tetap seiring berjalannya waktu implementasi TTP Lebaksiu yang dulunya sebagai wahana penerapan inovasi aplikatif spesifik lokasi yang matang dari hulu ke hilir kini mengalami perubahan menjadi wahana inkubasi pertanian. Perubahan terhadap tujuan tersebut terjadi karena hadirnya kebijakan baru yang kemudian mempengaruhi kebijakan yang sudah ada. Kebijakan baru yang dimaksud dapat memberikan perubahan terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah perubahan terhadap implementasi produk kebijakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pembangunan TTP belum berjalan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas. Selain itu perbedaan kemampuan implementator dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda. Terlebih lagi dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan yang secara tidak langsung

mewajibkan keterlibatan TTP.

Salah satu hal penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi masud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu dapat dilihat dari dalam isi kebijakan yang tertuang dalam bab di dalam pedoman umum. Implementasi kebijakan dapat gagal karena bergesernya isi atau tujuan kebijakan serta tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka upaya pengembangan TTP Lebaksiu, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten Tegal telah berkomitmen untuk mengembangkan TTP di Lebaksiu Kabupaten Tegal dengan tujuan dan sasaran yang sudah jelas.

Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut George C. Edward III adalah konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengembangan TTP Lebaksiu yaitu komunikasi antara BPTP bersama BPD Provinsi dengan Bupati Kabupaten Tegal bersama Kepala Dinas Tan & KP. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi pengembangan TTP belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas. Keberlanjutan komunikasi belum terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Perbedaan kemampuan implementator dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi TTP Lebaksiu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan TTP itu sendiri. Sumber daya dalam TTP Lebaksiu terdapat pada sumber daya manusia dan

sumber daya anggaran. Secara keseluruhan (umum) sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi TTP Lebaksiu memiliki kriteria dan peran masing-masing. Berikut penjelasan sumberdaya manusia dan sumber daya anggaran dalam TTP Lebaksiu.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang ada dalam TTP Lebaksiu adalah pegawai di UPTD TTP dan Pembibitan. Pegawai pada UPTD TTP Lebaksiu dan Pembibitan berjumlah 3 orang dan dibantu 4 orang dari Dinas Tan & KP, yang terdiri dari 1 kepala UPTD, 1 administrasi dan 5 orang staf. Menurut beberapa sumber, pegawai yang berada di UPTD TTP dan Pembibitan Kabupaten Tegal masih sangat kurang. Apalagi mengingat orientasi TTP yang seharusnya menjadi pusat diseminasi inovasi dan teknologi pertanian.

Sumber daya manusia yang ada setelah penyerahan TTP ke pemerintah Kabupaten Tegal, hanya diselenggarakan oleh Dinas Tan & KP, sehingga TTP yang diusung pasca serah terima terkesan bersifat administratif. Secara keseluruhan jumlah staf yang ada di level dinas masih sangat kurang sehingga dilakukan pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan diluar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Sedangkan dalam Dinas Tan & KP Kabupaten Tegal jumlah personil pelaksana program ada 7 orang. Orang-orang tersebut merupakan pegawai yang berada di UPTD TTP dan Pembibitan. Sementara itu sumber daya manusia ketika dibawah BPTP langsung hampir seluruh komponen pegawai yang tersedia di TTP Lebaksiu terpenuhi. Alasan utama mengapa TTP Lebaksiu tersebut kekurangan sumber daya manusia adalah bertransformasinya

TTP menjadi UPTD dibawah Dinas Tan & KP Kabupaten Tegal.

b. Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran selain mengandalkan dari APBD yang disisihkan dan difokuskan untuk TTP juga berasal dari profit hasil panen dan ternak. Dinas Tan & KP yang membawahi UPTD TTP dan Pembibitan masih berupaya untuk mencari sumber dana sehingga tidak hanya berasal dari APBD yang disisihkan, tetapi juga perlu adanya perhatian dalam bentuk kucuran dana baik dari pemerintah provinsi maupun perhatian dari pemerintah pusat. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pembiayaan dirasa kurang mencukupi. Hal inilah yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal.

3. Sikap Kecenderungan

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, artinya ada dukungan dan potensi besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam visi kebijakan itu. Demikian pula sebaliknya, jika sikap atau prespektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan visi kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari:

a. Rekrutmen pengurus/pengangkatan birokrat

Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di Dinas Tan & KP Kabupaten Tegal merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BPD) atas rekomendasi dari bupati. Pengangkatan birokrat dilakukan secara terbuka dengan menggunakan tes seleksi tertulis. Pengangkatan dan pemilihan personil struktural di Dinas

Tan & KP dilakukan oleh pemerintah dengan mekanisme penerimaan PNS sesuai dengan undang-undang. Sedangkan rekrutmen pengurus di UPTD TTP dan Pembibitan merupakan wewenang dari Kepala Dinas Tan & KP.

b. Insentif

Pendapat George C. Edward III, insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Pemberian insentif pada pegawai Dinas Tan & KP yaitu berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Dimana TPP diberikan selama 12 bulan dalam 1 tahun dan dibayarkan setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

3. Struktur Birokrasi

a. Fragmentasi

Struktur organisasi pada Dinas Tan & KP Kabupaten Tegal menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Dinas.

b. Standard Operating Procedure (SOP)

Salah satu struktur paling dasar

dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (*Standar Operating Procedure*). Dengan menggunakan *Standar Operating Procedure* para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Namun demikian implementasi kebijakan pengembangan TTP hingga saat ini belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja. SOP yang belum terbentuk terjadi karena masyarakat daerah sekitaran TTP belum memaksimalkan kehadiran TTP Lebaksiu. Selain itu TTP Lebaksiu juga masih belum sampai pada tahap unit BLUD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengembangan TTP secara garis besar belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Aspek transmisi yang terjadi cukup baik, terlihat dari pendeknya jalur birokrasi. (b) Aspek kejelasan pesan yang terjadi dalam perkembangan TTP cukup terjalin dengan baik. Terlebih TTP merupakan amanat dari nawacita presiden sehingga kepemilikan bersama atas TTP Lebaksiu menjadi lebih kuat. (c) Aspek konsistensi pesan terjadi perbedaan tafsir pesan antar komunikator kepada komunikan. Selain karena penyampaian informasi yang kurang jelas, kemampuan implementator dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda pula. Dukungan sumber daya sebagai berikut: (a) Sumber daya manusia di level dinas masih kurang terutama jumlah staf yang ada. (b) Sumber daya anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengembangan TTP menyulitkan petugas lapangan dalam membuat kegiatan secara optimal.

Disposisi tercermin dalam indikator berikut: (a) Pengangkatan dan pemilihan personal untuk jabatan di Dinas Tan & KP Kabupaten Tegal merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BPD) atas rekomendasi dari bupati. (b) Pemberian insentif pada pegawai Dinas Tan & KP yaitu berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Struktur birokrasi yang ada pada TTP Lebaksiu dilihat melalui dua aspek yang dapat dilihat sebagai berikut: (a) Fragmentasi struktur organisasi TTP ini membentuk pola koordinasi yang terjalin dan menempatkan TTP sebagai UPTD dibawah Kepala Dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Dinas. (b) Standar Operating Procedure (SOP) yang ada di TTP Lebaksiu hingga saat ini belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja.

Saran

Bagi *stakeholder* yang berkepentingan sosialisasi langsung mengenai program-program atau kegiatan yang dilaksanakan terkait pengembangan TTP kepada masyarakat perlu dilakukan dan penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai keberlanjutan serta pendampingan dari provinsi maupun pusat. Koordinasi antara institusi terkait dan kejelasan informasi harus ditingkatkan dan perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya anggaran dan peningkatan kapasitas dan peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan TTP. Untuk penelitian selanjutnya perlu untuk diketahui penelitian ini masih didasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang terbatas waktunya sehingga masih terdapat kelemahan. Program yang terbilang masih baru dan kurangnya sosialisasi, SOP yang belum belum terbentuk akibat program TTP dijadikan unit pelaksana teknis sehingga dianjurkan untuk melihat implementasi secara lebih komprehensif dan teliti mengenai pelaksanaan upaya pengembangan TTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ardhana, I Putu Gede. 2008. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Denpasar: Unud
- Azikiwe, A. I., Monde, N., Obi, A., and Sunday, O. A. (2013). Quality of Extension Services: A Case Study of Farmers in Amathole. *Journal of Agricultural Science* 5 (2).
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. Englewood Chief: New Jersey Prentice – Hall Inc
- Fatchiya, A. 2016. Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian dan Hubungannya dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani. *Jurnal Penyuluhan* 12 (2) : 190-192
- Hansson, F., Husted, K., & Vestergaard, J. (2005). Second Generation Science Parks: From Structural Holes Jockeys to Social Capital Catalysts of the Knowledge Society. *Technovation*, 25(9): 1039-1049.
- Indraningsih, K, S. 2011. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Keputusan Petani dalam Adopsi Inovasi Teknologi Usahatani Terpadu. *Jurnal Agro Ekonomi Vol 29 (1): 1-24*
- Islamy, Irfan M. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kementan. 2016. *Pedoman Untuk Pengembangan Taman Sains dan Teknologi Pertanian (TSTP)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian
- Kementan. 2018. *Statistik Pertanian 2018*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Republik Indonesia
- Khoirunnas, F. dan Niswah, F. (2017). Manajemen Strategi Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *Jurnal Kajian Manajemen Pelayanan Publik*.5(3): 1-8.
- Nawawi, H. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi. Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyowati, L. (2003). Usahatani Kontrak (Contract Farming) pada Agribisnis Sayuran serta Peranannya dalam Optimalisasi Penggunaan Faktor Produksi. *Disertasi Program Pascasarjana*. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Sutopo, H. B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Dasar teori dan terapannya dalam penelitian. Edisi 2. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Widodo, J. 2001. *Good Governace Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia
- Widodo, J. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Widodo, J. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Bayumedia
- Wibowo, A, P. 2011. *Analisis Tingkat Partisipasi Petani dalam Kegiatan Prima Tani Lahan Sawah Intensif Di Kabupaten Grobogan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proes dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)